

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks *restorative justice*, terdapat dua kesimpulan dalam penggunaan *restorative justice*, seperti :

1. Pelaku investasi ilegal daring mendapatkan pembalasan dengan cara pertemuan dengan korban. Melalui pertemuan ini, pelaku dapat memahami dampak buruk dari perbuatannya terhadap korban secara pribadi sehingga membantu pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya dan merasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan memberikan restitusi kepada korban dengan membayar ganti rugi atau mengembalikan uang yang telah diinvestasikan secara ilegal kepada korban. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku.
2. Perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal daring yang dirugikan, disediakan oleh sejumlah lembaga negara seperti Bapepam-LK, OJK, dan PPATK. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif untuk mencegah dan memberantas tindakan ilegal serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, adanya kemungkinan untuk mengajukan tuntutan hukum PMH (Perbuatan Melawan Hukum) bagi korban investasi ilegal daring yang menjadi korban penanaman modal ilegal memberikan saluran hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku investasi ilegal daring.

B. Saran

Pemerintah harus memperkuat undang-undang terkait investasi dan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan investasi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan otoritas terkait seperti bank dan lembaga pengawas pasar modal dengan cara melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga keuangan dan otoritas yang terkait. Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi pelapor investasi ilegal seperti penghargaan finansial dan melindungi identitas pelapor tersebut.

Sebelum melakukan investasi, penting bagi masyarakat untuk melakukan riset dan penelitian secara menyeluruh terkait perusahaan atau skema investasi yang mereka pertimbangkan dengan cara melakukan konsultasi dengan ahli keuangan yang dapat memberikan nasihat yang obyektif dan profesional. Selain hal tersebut, masyarakat juga dapat berbagi informasi dan pengalaman mereka dengan orang lain mengenai investasi ilegal yang mereka temui.

Lembaga negara yang menangani kasus investasi ilegal perlu memperkuat kapasitas dan keahlian tim mereka dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap pelaku investasi ilegal. Oleh karena itu, lembaga negara harus mengadopsi dan memanfaatkan teknologi canggih, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan teknik forensik digital, untuk mendeteksi, melacak, dan mengumpulkan bukti terkait kasus investasi ilegal.